

KOLABORASI GOVERNMENT PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Ai Hanifah Milati¹, Indriyati Kamil², Ade Sudrajat³

Email : ai.hanipah79@gmail.com¹, Rindriya73@gmail.com², sudrajatade128@gmail.com³

¹Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana

^{2,3}Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak sekolah, menurunkan stunting, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional, sehingga memerlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor yang efektif, termasuk pada tingkat kecamatan seperti Sumedang Utara yang menjadi wilayah strategis dalam rencana perluasan cakupan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaborasi pemerintah dalam pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sumedang Utara, dengan fokus pada interaksi aktor, dinamika koordinasi, serta kapasitas tata kelola berdasarkan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) Emerson.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), serta dokumentasi. Informan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, penyedia pangan (PKK/UMKM), kepala sekolah, serta tim pengawas program. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pelaksanaan MBG di Kecamatan Sumedang Utara berjalan, namun belum optimal. Pada aspek drivers, terdapat komitmen politik yang kuat dan kebutuhan kolaborasi karena kompleksitas masalah gizi. Namun, kapasitas sumber daya di tingkat kecamatan dan sekolah masih terbatas. Pada aspek dynamics, proses principled engagement berjalan baik melalui rapat koordinasi dan musyawarah lintas sektor, tetapi shared motivation antara aktor belum merata, terutama terkait pemahaman standar gizi dan keamanan pangan. Aspek capacity for joint action menunjukkan bahwa pembagian peran antar instansi sudah jelas, namun infrastruktur dapur gizi (SPPG), sarana distribusi, serta kompetensi penyedia makanan masih memerlukan penguatan. Selain itu, kendala seperti keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak seragam, dan risiko keamanan pangan menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat, terstruktur, dan berkelanjutan.

Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi MBG di Kecamatan Sumedang Utara sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi lintas sektor, efektivitas koordinasi, serta kapasitas teknis dan kelembagaan pemerintah daerah. Penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi penyedia pangan, percepatan pembangunan SPPG, serta mekanisme pengawasan terpadu lintas instansi menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam program MBG di Sumedang Utara.

Kata kunci: kolaborasi pemerintah, Makan Bergizi Gratis, governance, kebijakan publik, Sumedang Utara.

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG) is a national priority initiative designed to improve students' nutritional status, reduce stunting, and strengthen human capital development toward Indonesia Emas 2045. Sumedang Regency has been designated as one of the national pilot regions, requiring an effective cross-sector collaborative governance structure, especially in subdistricts such as North Sumedang, which is a strategic area for program expansion. This study aims to analyze the government collaboration in implementing the MBG Program in North Sumedang Subdistrict, focusing on actor interaction, coordination dynamics, and governance capacity using Emerson's Collaborative Governance Regime (CGR) framework.

This research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. Informants consisted of officials from the Sumedang Regency Government, North Sumedang Subdistrict, the Education Office, the Health Office, local food providers (PKK/UMKM), school principals, and program monitoring teams. Data validity was ensured using source, technical, and temporal triangulation.

The findings indicate that the collaborative implementation of the MBG Program in North Sumedang is progressing but remains suboptimal. In terms of drivers, strong political commitment and interdependence among actors exist due to the complexity of nutritional issues; however, resource capacity at the subdistrict and school levels remains limited. Regarding collaborative dynamics, principled engagement is reflected through regular coordination meetings and cross-sector discussions, yet shared motivation varies among actors, particularly in understanding nutritional standards and food safety requirements. The capacity for joint action shows clear role distribution across agencies, but infrastructure for satellite kitchens (SPPG), distribution logistics, and the competence of food providers still require significant strengthening. Persistent challenges—such as distribution delays, inconsistent food quality, and risks of food safety incidents—highlight the need for more rigorous, structured, and continuous monitoring mechanisms.

The study concludes that the success of MBG implementation in North Sumedang is highly dependent on the quality of inter-sectoral collaboration, the effectiveness of coordination, and the technical as well as institutional capacity of local government actors. Strengthening coordination platforms, improving food provider competencies, accelerating SPPG development, and establishing an integrated multi-agency monitoring system are key recommendations to enhance collaborative governance in delivering the MBG Program.

Keywords: *collaborative governance, Free Nutritious Meal Program, public policy, multi-sector coordination, Sumedang.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi agenda strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kualitas manusia sebagai modal utama kemajuan bangsa. Pemerintah menekankan bahwa peningkatan derajat kesehatan, perbaikan status gizi, dan penguatan

pendidikan dasar merupakan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional dengan mandat langsung untuk meningkatkan ketahanan gizi, kualitas kesehatan, dan prestasi belajar peserta didik

sekolah dasar dan menengah. Program ini berfungsi sebagai salah satu instrumen strategis negara dalam mempersiapkan SDM unggul melalui intervensi gizi yang sistematis dan terukur.

MBG dirancang selaras dengan tiga pilar Visi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan SDM unggul, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan. Program ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas kognitif peserta didik, penurunan prevalensi stunting, serta penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan dapur satelit sebagai penyedia layanan makanan sehat. Kontribusi tersebut tercermin dalam kerangka hubungan visi nasional dengan pelaksanaan MBG sebagaimana tergambar pada tabel Pilar Visi

Tabel Pilar Visi

Pilar Visi 2045	Kontribusi MBG
Pilar I: Pembangunan SDM dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menciptakan generasi yang memiliki kesehatan fisik dan kecerdasan kognitif optimal akibat asupan gizi yang baik, sehingga siap belajar dan berinovasi.
Pilar II: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas kerja di masa depan dan menekan biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penyakit terkait gizi buruk atau stunting.
Pilar III: Pemerataan Pembangunan	Memastikan pemerataan gizi dan akses pangan sehat bagi anak-anak di seluruh wilayah,

Pilar Visi 2045	Kontribusi MBG
	termasuk di daerah 3T, sehingga tidak ada kesenjangan potensi SDM.

Namun, implementasi MBG tidak terlepas dari tantangan besar. Indonesia masih menghadapi persoalan masalah gizi gandastunting, wasting, dan anemia pada satu sisi, serta obesitas pada sisi lain. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa prevalensi stunting masih berada pada kisaran 17–18%, menandakan bahwa intervensi gizi seperti MBG masih sangat diperlukan, khususnya di wilayah rawan gizi seperti Kecamatan Sumedang Utara. Selain tekanan masalah gizi, kualitas pendidikan anak usia sekolah juga terdampak oleh tingkat kecukupan gizi. Rendahnya asupan makro dan mikro nutrien berkontribusi terhadap menurunnya fokus belajar, absensi tinggi, dan rendahnya capaian akademik.

Sebagai daerah yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan nasional, Kabupaten Sumedang telah menyiapkan kerangka regulasi, mulai dari Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2024 hingga Keputusan Bupati Nomor 400.7.13/KEP.389-HUK/2025 tentang pembentukan Satgas MBG. Regulasi ini mengatur mekanisme pengadaan, distribusi, dan pengawasan program secara sistematis. Struktur pelaksanaan tersebut menempatkan PKK Kecamatan, UMKM lokal, sekolah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan sebagai aktor utama dalam rantai penyediaan dan pemantauan kualitas makanan bergizi bagi peserta didik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Stuktur dan Mekanisme.

Tabel Stuktur dan Mekanisme

Aspek Implementasi	Mekanisme di Kabupaten Sumedang	Implikasi terhadap Pengawasan
Pelaksana Pengadaan	Melibatkan Tim Penggerak PKK Kecamatan, UMKM lokal, atau Dapur Satelit.	Pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas <i>catering</i> dan kepatuhan terhadap standar higienis.
Pendistribusian	Sekolah (SD/SMP) bertugas mendistribusikan makanan dan memastikan proses berjalan lancar.	Pengawasan memastikan ketepatan jumlah dan waktu distribusi di setiap sekolah (termasuk di Sumedang Utara).
Standar Menu	Menu dirancang untuk memenuhi standar Gizi Seimbang (karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan susu).	Pengawasan gizi (oleh Dinas Kesehatan) harus memverifikasi bahwa menu yang disajikan sesuai standar nutrisi yang ditetapkan.
Pihak Pemantau	Uji coba melibatkan Tim Pemantau gabungan dari Dinas Kesehatan,	Pengawasan tidak hanya internal, tetapi melibatkan multi-pihak

Aspek Implementasi	Mekanisme di Kabupaten Sumedang	Implikasi terhadap Pengawasan
	Dinas Pendidikan, dan unsur keamanan (TNI/Polri).	untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas

Meski demikian, implementasi awal MBG menunjukkan sejumlah kendala penting. Tantangan distribusi makanan, keterbatasan dapur satelit, hambatan logistik antar sekolah, dan ketidaksesuaian menu dengan standar gizi menjadi catatan krusial di beberapa wilayah. Beberapa kasus bahkan menunjukkan keterlambatan distribusi serta ketidakkonsistenan menu sehingga mengurangi efektivitas intervensi program. Di beberapa daerah lain yang menjadi pembanding nasional, ditemukan isu keamanan pangan seperti keluhan kesehatan peserta setelah mengonsumsi makanan program, yang menunjukkan bahwa standar higienitas penyedia belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan lintas instansi yang lebih terstruktur, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemeriksaan menu harian di dapur satelit dan sekolah.

Kecamatan Sumedang Utara, sebagai fokus penelitian, merupakan salah satu wilayah percontohan yang menghadapi tantangan implementasi cukup kompleks. Keragaman jumlah siswa, kondisi fasilitas sekolah yang berbeda, kapasitas penyedia lokal, dan kesiapan infrastruktur dapur membuat pengawasan dan koordinasi menjadi aspek kritis. Selain itu, keberhasilan MBG secara nasional sangat bergantung pada akurasi data dan efektivitas pelaksanaan di lokasi percontohan seperti Sumedang Utara, sehingga

wilayah ini menjadi barometer implementasi kebijakan MBG secara lebih luas .

Pelaksanaan MBG membutuhkan kolaborasi multisektor yang kuat karena melibatkan aktor dari pemerintah pusat hingga tingkat sekolah. Kompleksitas program menuntut adanya tata kelola kolaboratif yang dapat menjamin keselarasan kepentingan, pembagian peran yang jelas, dan koordinasi yang efektif. Dalam konteks ini, kerangka teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2007; Emerson et al., 2012) relevan digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) menjadi landasan evaluatif untuk menilai sejauh mana program MBG dilaksanakan sesuai pedoman dan prosedur yang ditetapkan .

Meskipun regulasi, struktur pelaksana, dan mekanisme pengawasan telah disiapkan dengan baik, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi MBG masih bergantung pada faktor kolaborasi antaraktor, kualitas komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, dan komitmen pelaksana. Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai kolaborasi government dalam pelaksanaan MBG di Kecamatan Sumedang Utara menjadi sangat penting, baik sebagai upaya akademik maupun kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kolaborasi government dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada dinamika koordinasi lintas instansi, efektivitas pengawasan, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan memahami fenomena implementasi dan kolaborasi government dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mendalam berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, serta dinamika interaksi antaraktor yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Pilihan ini konsisten dengan pernyataan pada dokumen bahwa penelitian menekankan proses interpretatif dan analitis terhadap fenomena sosial.

Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana kolaborasi pemerintah, sekolah, penyedia makanan (UMKM/dapur satelit), serta aktor pendukung program terjalin dalam pelaksanaan MBG di Kecamatan Sumedang Utara.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, yang merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan dalam pengelolaan pengadaan dan seleksi CPNS. Penelitian dilakukan selama rentang November 2024 hingga Februari 2025, sejalan dengan proses penyusunan data lapangan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian.

Informan Penelitian

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman langsung terhadap pelaksanaan program MBG. Informan yang diwawancarai meliputi:

1. Camat Sumedang Utara – sebagai koordinator wilayah pelaksanaan MBG.
2. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang – terkait koordinasi sekolah dan pengawasan program.
3. Dinas Kesehatan / Puskesmas – terkait standar gizi, keamanan pangan, dan pemeriksaan makanan.
4. Kepala Sekolah dan guru – sebagai pelaksana harian program di tingkat satuan pendidikan.
5. PKK Kecamatan dan PKK kelurahan – sebagai pelaksana dapur satelit/pengelola penyedia makanan.
6. UMKM penyedia menu MBG – sebagai pihak penyedia yang bertanggung jawab menghasilkan makanan bergizi.
7. Orang tua siswa dan peserta didik – sebagai penerima manfaat program.

Pemilihan informan mengikuti pedoman metodologi dalam dokumen yang menjelaskan bahwa informan dipilih berdasarkan relevansi peran dalam implementasi MBG.

Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada dokumen metodologi, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada seluruh informan kunci. Metode ini dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi lebih luas, sekaligus tetap menjaga fokus penelitian. Panduan wawancara disusun mengacu pada variabel teori Collaborative Governance dan teori implementasi Edward III.

b. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan pada kegiatan pelaksanaan MBG, mulai dari proses produksi makanan di dapur satelit, distribusi ke sekolah, penyajian, hingga penerimaan peserta didik.

Observasi juga diarahkan pada proses koordinasi antaraktor. Dokumen menunjukkan bahwa observasi digunakan untuk melihat kesesuaian implementasi di lapangan dengan pedoman program MBG.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi diperoleh dari regulasi, tabel jumlah penerima MBG, SOP pengolahan makanan, pedoman operasional MBG, laporan monitoring, notulen rapat, dan arsip pemerintah daerah. Dokumen merupakan bagian penting dalam triangulasi untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Teknik Validitas Data

Penelitian menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk menjamin validitas data. Dokumen metodologi menegaskan bahwa triangulasi digunakan untuk membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih kredibel dan objektif.

Teknik Analisis Data

Merujuk pada prosedur analisis data Miles & Huberman (1994) sebagaimana dijelaskan dalam dokumen, penelitian menggunakan tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan tema: kolaborasi antaraktor, kendala implementasi, efektivitas program, dan peran masing-masing lembaga.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, matriks, dan bagan hubungan antaraktor untuk memudahkan analisis pola-pola kolaborasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan ditarik secara iteratif berdasarkan interpretasi data yang dikaitkan dengan teori Collaborative Governance Regime dan model implementasi kebijakan Edward III. Proses verifikasi dilakukan sepanjang analisis untuk menjaga konsistensi temuan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian berlandaskan pada:

1. Collaborative Governance Regime (Emerson, Nabatchi & Balogh) — menekankan dinamika kolaborasi antaraktor pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan.
2. Model implementasi kebijakan Edward III — mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Kerangka ini digunakan untuk menganalisis hubungan antarkomponen dalam implementasi MBG, sebagaimana tercantum dalam rumusan metodologi dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Sumedang Utara

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan bahwa program telah dijalankan sesuai petunjuk teknis melalui mekanisme penyediaan makanan oleh UMKM/dapur satelit, didistribusikan ke sekolah, dan dikonsumsi oleh peserta didik. Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah menerima porsi makanan sesuai jadwal, meskipun terdapat variasi kualitas menu dan keterlambatan distribusi pada beberapa hari pelaksanaan.

Kegiatan observasi peneliti terhadap menu MBG memperlihatkan bahwa sekolah seperti **SDN Panyingkiran II** menerima makanan dengan kualitas cukup baik, namun porsi dan variasi menu belum sepenuhnya seragam antar dapur satelit. Hal ini konsisten dengan keterangan informan yang menyatakan bahwa penyedia sering kesulitan memenuhi standar gizi pada hari tertentu karena keterbatasan bahan baku dan kapasitas produksi UMKM.

Analisis Kolaborasi Government dalam Pelaksanaan MBG

Analisis kolaborasi menggunakan kerangka Collaborative Governance Regime (CGR) yang mencakup principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action.

Principled Engagement

Kolaborasi antaraktor (kecamatan, sekolah, PKK, penyedia, Dinsos, Dinkes, Disdik) telah terbangun melalui komunikasi rutin, koordinasi rapat, serta pelibatan lintas lembaga, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumentasi daftar kehadiran musyawarah pelaksanaan MBG di Kecamatan Sumedang Utara.

Namun, tingkat partisipasi antaraktor belum sepenuhnya seimbang. Beberapa pelaksana di sekolah menyebutkan bahwa informasi sering terlambat diterima, terutama terkait perubahan menu atau penyesuaian waktu pengantaran. Hal ini menunjukkan bahwa principled engagement sudah berjalan namun perlu diperkuat melalui mekanisme informasi yang lebih terstruktur.

Shared Motivation

Motivasi bersama antaraktor berada pada kategori kuat. Kepala sekolah, guru, PKK, dan penyedia UMKM mengakui bahwa

program MBG membawa manfaat nyata bagi siswa dari sisi gizi dan kesiapan belajar. Wawancara menunjukkan kesadaran tinggi bahwa program ini merupakan amanah nasional yang harus dijalankan sebaik mungkin.

Namun, beberapa penyedia menyampaikan keterbatasan kapasitas produksi harian, yang menyebabkan beban kerja tinggi tanpa dukungan fasilitas tambahan. Hal ini dapat menurunkan motivasi jika tidak ditopang oleh kebijakan penguatan kapasitas UMKM ke depan.

Capacity for Joint Action

Kapasitas bersama untuk menjalankan program MBG masih menghadapi beberapa hambatan:

1. Keterbatasan fasilitas dapur, terutama pada UMKM yang belum memiliki peralatan produksi skala besar.
2. Minimnya tenaga pendamping gizi sehingga pengawasan menu kurang optimal.
3. Variasi kemampuan sekolah dalam mengelola distribusi, bergantung pada jumlah siswa dan fasilitas penyimpanan.

Temuan observasi makanan dan daftar pendukung pelaksanaan di sekolah menunjukkan bahwa kapasitas teknis belum merata antar penyedia maupun antar sekolah .

Analisis Implementasi Kebijakan Menggunakan Model Edward III

Model Edward III digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi berdasarkan empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi antara kecamatan, sekolah, dan penyedia makanan cukup intens melalui grup WhatsApp, pertemuan koordinasi, dan surat edaran. Namun, sejumlah kepala sekolah menyampaikan bahwa informasi sering diberikan mendadak, terutama terkait jadwal distribusi dan penggantian menu harian.

Dokumen tanda terima makanan memperlihatkan adanya hari tertentu di mana makanan terlambat diterima oleh sekolah, sering kali akibat miskomunikasi antara penyedia dan koordinator kecamatan .

Sumber Daya

Sumber daya manusia pelaksana di sekolah cukup memadai, namun sumber daya penyedia masih terbatas. Terdapat 6 dapur satelit dengan kapasitas berbeda-beda, dan sebagian UMKM masih memiliki fasilitas terbatas untuk memenuhi standar higienitas dan ketepatan waktu.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa tidak semua penyedia memiliki standar penyimpanan bahan baku dan pengolahan yang sama, sehingga kualitas menu bervariasi antar sekolah.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana tergolong baik. Informan sekolah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan makanan diterima siswa, bahkan dengan melakukan penyesuaian jadwal belajar ketika distribusi terlambat. Ibu-ibu PKK yang terlibat juga menunjukkan antusiasme dalam penyediaan makanan.

Namun, terdapat penyedia yang merasa beban kerja cukup berat dan kompensasi belum sepenuhnya sebanding,

berpotensi menurunkan komitmen jangka panjang.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah disiapkan melalui berbagai regulasi daerah dan pembentukan satgas, sesuai SK Bupati Sumedang dan SOP MBG.

Daftar struktur organisasi pelaksana di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara koordinator kecamatan, sekolah, PKK, dan penyedia makanan.

Namun demikian, mekanisme monitoring dan evaluasi di sekolah masih belum berjalan setiap hari karena keterbatasan tenaga dari Dinas Kesehatan.

Faktor Pendukung Pelaksanaan MBG

Berdasarkan data lapangan, faktor pendukung utama meliputi:

a. Komitmen kuat antaraktor

Terlihat dari kehadiran semua pihak dalam rapat koordinasi dan kesiapan sekolah melakukan penyesuaian jadwal jika terjadi keterlambatan distribusi.

b. Dukungan regulasi lengkap

Terdapat Perbup, SK Satgas, SOP, dan mekanisme administrasi yang menjadi dasar pelaksanaan.

c. Keterlibatan PKK dan UMKM

PKK memainkan peran signifikan dalam produksi makanan, sementara UMKM menjadi motor ekonomi lokal yang memperkuat ketersediaan menu.

Faktor Penghambat Pelaksanaan MBG

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hambatan utama mencakup:

a. Keterlambatan distribusi makanan

Beberapa *tanda terima* menunjukkan jam penerimaan makanan melewati batas ideal makan siang. Hal ini disebabkan oleh kendala transportasi dan antrean produksi di dapur satelit.

b. Kapasitas penyedia yang belum merata

Beberapa UMKM memiliki fasilitas minimal, sehingga porsi dan kualitas menu tidak seragam antar sekolah.

c. Minimnya tenaga pengawas keamanan pangan

Dinas Kesehatan tidak dapat melakukan monitoring setiap hari ke seluruh sekolah.

d. Menu tidak selalu sesuai standar gizi

Hasil observasi menunjukkan variasi menu yang tidak selalu mengikuti pedoman hidangan seimbang.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kolaborasi government berjalan, tetapi belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi peran dan pemerataan kapasitas.

Pola kolaborasi lebih bersifat koordinatif, belum sepenuhnya kolaboratif sebagaimana konsep *Collaborative Governance Regime*.

2. Implementasi kebijakan MBG cukup baik, ditunjukkan oleh komitmen pelaksana, keberadaan regulasi, dan komunikasi aktif antaraktor.

Namun, variasi kualitas layanan antar dapur satelit menunjukkan bahwa

variabel *sumber daya* merupakan titik terlemah dalam model Edward III.

3. **Keterlambatan distribusi** menjadi isu paling berpengaruh terhadap efektivitas program, karena berkaitan langsung dengan jam makan siswa.
4. **Faktor sosial dan budaya** seperti gotong royong PKK dan dukungan orang tua memperkuat keberlangsungan program.

Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknis penyediaan makanan, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antaraktor lokal, kesiapan UMKM, serta mekanisme pengawasan yang konsisten.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian mengenai pelaksanaan Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan tingkat efektivitas yang cukup baik, terutama pada aspek komitmen pelaksana dan kepatuhan terhadap pedoman teknis. Kolaborasi antaraktor pemerintah kecamatan, sekolah, PKK, UMKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan telah terbentuk meskipun berada pada tahap **koordinatif**, belum sepenuhnya mencapai bentuk *collaborative governance* yang ideal.

Hasil penelitian mengungkap beberapa poin utama:

1. **Kolaborasi Government**
Kolaborasi antar pihak berjalan melalui rapat koordinasi, komunikasi aktif, dan pembagian peran. Namun, koordinasi masih didominasi top-down, belum sepenuhnya berbasis partisipasi setara antaraktor.
2. **Implementasi Kebijakan MBG (Model Edward III)**

- a. **Komunikasi** cukup efektif melalui grup WA dan surat edaran, tetapi informasi sering bersifat mendadak.
- b. **Sumber daya** merupakan faktor terlemah: kapasitas dapur satelit/UMKM belum merata, fasilitas minim, dan tenaga kesehatan terbatas.
- c. **Disposisi pelaksana** sangat baik, ditandai dengan komitmen tinggi sekolah, PKK, dan penyedia.
- d. **Struktur birokrasi** jelas melalui Perbup, SK Satgas, dan SOP, namun pengawasan belum optimal secara harian.

3. Kualitas dan Ketepatan Distribusi Menu

Variasi menu dan porsi antar sekolah masih berbeda-beda. Keterlambatan distribusi terjadi pada beberapa hari karena beban produksi UMKM dan kendala transportasi.

4. Hambatan Utama

- a. keterlambatan distribusi makanan;
- b. perbedaan kapasitas antar dapur satelit;
- c. kurangnya pengawasan keamanan pangan;
- d. ketidaksesuaian menu dengan standar gizi pada hari tertentu.

Secara keseluruhan, MBG di Kecamatan Sumedang Utara telah memberikan **manfaat signifikan** bagi peserta didik dan ekonomi lokal, tetapi efektivitas jangka panjang membutuhkan penguatan kapasitas, koordinasi, dan pengawasan.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, rekomendasi berikut disusun untuk meningkatkan pelaksanaan MBG:

1. Penguatan Kapasitas UMKM/Dapur Satelit

- a. Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan pengolahan makanan bergizi, manajemen produksi, dan standar higienitas.
- b. Penambahan peralatan dapur, seperti kompor industri, alat sterilisasi, dan wadah pengangkutan kedap panas, perlu difasilitasi.

2. Optimalisasi Koordinasi Antaraktor

- a. Informasi teknis (menu, jadwal antar, penyesuaian kegiatan) harus diberikan melalui sistem komunikasi yang terjadwal dan terdokumentasi.
- b. Rapat koordinasi rutin harus memasukkan evaluasi kendala harian, bukan hanya laporan bulanan.

3. Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Dinas Kesehatan perlu menambah frekuensi inspeksi ke dapur satelit dan sekolah.
- b. Sekolah perlu dilengkapi buku kontrol harian tentang kondisi makanan, rasa, porsi, dan waktu tiba.

4. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Menu

- a. Penyedia harus menggunakan *menu cycle* yang disetujui oleh ahli gizi dan dipantau setiap minggu.
- b. Pemanfaatan bahan baku lokal perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas dan menekan biaya.

5. Perbaikan Manajemen Distribusi

- a. Penjadwalan distribusi harus lebih ketat dan menyesuaikan jarak serta jumlah siswa per sekolah.

- b. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kendaraan operasional khusus untuk pengiriman makanan.

6. Pemberdayaan PKK dan Sekolah

- a. PKK perlu diberikan pelatihan tambahan terkait pengawasan makanan serta sistem pendampingan menu.
- b. Sekolah dapat membentuk *Food Safety Task Force* internal yang beranggotakan guru dan orang tua.

7. Pengembangan Sistem Monitoring Digital

- a. Aplikasi pelaporan harian berbasis foto/waktu (timestamp) dapat dikembangkan untuk memastikan transparansi distribusi dan kualitas menu.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2015). *Creating public value in practice: Advancing the common good in a multi-sector, shared-power world*. CRC Press.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. (2015). *The public administration theory primer* (3rd ed.). Westview Press.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance?* Routledge.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Principles and processes*. Oxford University Press.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1989). *Implementation and public policy*. University Press of America.
- Subarsono, A. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Almatsier, S. (2011). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman gizi seimbang*. Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Profil pendidikan nasional: Statistik pendidikan dasar dan menengah*. Kemendikbudristek.
- World Health Organization. (2020). *Nutrition in adolescence: Issues and challenges for the health sector*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *Child malnutrition and health*. WHO Regional Office.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children: Nutrition*. UNICEF.
- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Agranoff, R. (2006). Inside collaborative networks: Ten lessons for public managers. *Public Administration Review*, 66(1), 56–65.
- McGuire, M. (2006). Collaborative public management: Assessing what we know and how we know it. *Public Administration Review*, 66, 33–43.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. (2024). *Kecamatan Sumedang Utara dalam angka*. BPS Sumedang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei status gizi Indonesia (SSGI)*. Kemenkes RI.

- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2024).
*Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang 2024–2029*.
Pekab Sumedang.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. (2024).
*Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang*. Disdik
Sumedang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.
(2014). *Qualitative data analysis: A
methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.